



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Proles, Justitia

FAKULTAS  
**TEKNIK**



# Buku Panduan PROGRAM HIBAH POLICY BRIEF FTUI 2026

**Panduan Hibah  
Unit Riset, Inovasi dan  
Pengabdian Masyarakat**



[riset.ft@ui.ac.id](mailto:riset.ft@ui.ac.id)



[research.eng.ui.ac.id](http://research.eng.ui.ac.id)



[ripm.ftui](https://www.instagram.com/ripm.ftui)

# DAFTAR ISI

Kata pengantar	3
1. Pendahuluan	4
2. Ruang lingkup program	5
3. Skema pendanaan	7
4. Persyaratan pengusul	9
5. Jadwal pelaksanaan	11
6. Mekanisme pengajuan	13
7. Evaluasi dan seleksi	15
8. Monitoring dan evaluasi	17
9. Mekanisme pembayaran	19
10. Sanksi	21
11. Luaran dan KPI	23
12. Penutup	25

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Panduan Program Hibah Policy Brief Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik. Program ini merupakan bagian dari komitmen strategis FTUI dalam memperkuat kontribusi akademisi terhadap proses perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan dinamis, pengambilan kebijakan tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata, melainkan harus didukung oleh analisis ilmiah yang kuat dan terukur. Universitas Indonesia melalui Rencana Strategis 2025-2029 menegaskan pentingnya peran riset dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjembatani kesenjangan antara hasil penelitian akademik dengan kebutuhan kebijakan publik.

Program Hibah Policy Brief ini dirancang sebagai instrumen strategis untuk mentransformasikan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan yang ringkas, tajam, dan implementatif. Dengan mengacu pada Roadmap Riset dan Inovasi Universitas Indonesia 2025-2029, yang menekankan pentingnya kontribusi riset terhadap penyelesaian masalah bangsa dan global, program ini diharapkan mampu meningkatkan relevansi dan dampak penelitian di lingkungan FTUI.

Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi acuan yang komprehensif bagi para peneliti dalam menyusun policy brief yang berkualitas tinggi dan berdampak nyata. Dengan dukungan dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, program ini diharapkan menjadi katalis dalam memperkuat peran FTUI sebagai pusat unggulan dalam pengembangan kebijakan berbasis riset.

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam era disrupsi global yang ditandai oleh perkembangan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, kebutuhan akan kebijakan publik yang adaptif dan berbasis bukti menjadi semakin mendesak. Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut melalui penelitian yang berkualitas.

Roadmap Riset dan Inovasi Universitas Indonesia 2025-2029 menegaskan bahwa riset harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian permasalahan bangsa dan global melalui pendekatan inovatif dan berbasis kebijakan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara hasil penelitian akademik dengan implementasi kebijakan publik, di mana banyak hasil riset yang belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional.

Di sisi lain, Renstra UI 2025-2029 menekankan pentingnya peningkatan kontribusi riset terhadap indikator daya saing global, termasuk publikasi, sitasi, serta dampak terhadap masyarakat dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa riset tidak hanya harus unggul secara akademik, tetapi juga relevan dan berdampak nyata.

Fakultas Teknik Universitas Indonesia, melalui Renstra FTUI 2025-2029, mengadopsi pendekatan berbasis dampak (*impact-driven research*) dan inovasi dalam mengembangkan ekosistem riset yang berdaya saing global. Dalam konteks ini, policy brief menjadi instrumen strategis untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan kebijakan.

Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 bertujuan untuk:

- Mendorong translasi hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif
- Mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*)
- Meningkatkan kontribusi akademis terhadap penyelesaian masalah nasional dan global
- Memperkuat posisi FTUI dalam ekosistem kebijakan publik dan global policy network
- Mendorong integrasi antara riset, inovasi dan kebijakan publik

## 2. RUANG LINGKUP PROGRAM

### 2.1. Cakupan Program

Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 memiliki ruang lingkup yang dirancang untuk menghasilkan dokumen kebijakan berbasis riset yang berkualitas tinggi dan berdampak nyata. Cakupan program tidak hanya terbatas pada kegiatan penelitian, tetapi juga mencakup proses translasi pengetahuan, komunikasi kebijakan, serta keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*).

Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik global dalam pengembangan kebijakan publik, di mana proses perumusan kebijakan melibatkan interaksi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat.

### 2.2. Definisi Policy Brief

Policy brief adalah dokumen analisis kebijakan yang ringkas, berbasis bukti ilmiah, dan disusun untuk memberikan rekomendasi yang jelas, terukur, dan implementatif kepada pengambil keputusan. Policy brief yang dihasilkan dalam program ini harus memenuhi karakteristik:

- Berbasis data dan analisis ilmiah
- Focus pada Solusi kebijakan
- Disusun secara ringkas dan komunikatif
- Memiliki relevansi tinggi terhadap isu strategi

### 2.3. Bidang Prioritas

Bidang prioritas program mengacu pada fokus riset Universitas Indonesia dan Fakultas Teknik yang relevan dengan tantangan global dan nasional, antara lain:

- Transformasi digital dan Artificial Intelligence
- Transisi energi dan keberlanjutan
- Infrastruktur dan kota berkelanjutan
- Teknologi kesehatan dan sistem biosains

- Perubahan iklim dan lingkungan
- Sistem keamanan siber dan teknologi terpercaya

Bidang ini selaras dengan agenda pembangunan nasional serta Sustainable Development Goals (SDGs).

#### 2.4. Luaran Program

Luaran wajib:

1. Satu (1) policy brief yang siap digunakan oleh pemangku kebijakan
2. *Forum Group Discussion* (FGD) diseminasi rancangan kebijakan

Luaran tambahan:

1. Policy engagement dengan stakeholder
2. Publikasi ilmiah pendukung
3. Kolaborasi dengan institusi pemerintah atau industri

## 3. SKEMA PENDANAAN

### 3.1. Prinsip Umum Pendanaan

Skema pendanaan dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong translasi hasil riset menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Pendekatan yang digunakan mengadopsi prinsip *output-based funding* dan *impact-driven research*, di mana pendanaan tidak hanya berorientasi pada aktivitas penelitian, tetapi pada kualitas dan implementabilitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Sejalan dengan Roadmap Riset dan Inovasi Universitas Indonesia 2025-2029, pendanaan riset diarahkan untuk menghasilkan solusi konkret terhadap permasalahan nasional dan global melalui pendekatan berbasis kebijakan. Oleh karena itu, setiap proposal yang didanai harus menunjukkan keterkaitan yang jelas antara analisis ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan.

Selain itu, skema pendanaan ini juga mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), efisiensi penggunaan sumber daya, serta akuntabilitas dalam pencapaian luaran program.

### 3.2. Nilai Hibah

Setiap proposal yang disetujui akan mendapatkan pendanaan maksimal sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per judul.

Besaran dana ini dirancang untuk mendukung kegiatan penelitian kebijakan yang komprehensif, termasuk pengumpulan data, analisis kebijakan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta penyusunan policy brief yang berkualitas tinggi dan siap diimplementasikan.

Pendanaan bersifat penunjukkan dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi proposal dengan mempertimbangkan kualitas analisis, relevansi kebijakan, serta potensi dampak yang dihasilkan.

### 3.3. Komponen Pembiayaan

Dana hibah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan dan analisis data kebijakan
- Studi literatur dan benchmarking kebijakan internasional
- Kegiatan diskusi dan konsultasi dengan stakeholder
- Penyusunan dan desain policy brief
- Diseminasi hasil melalui forum kebijakan atau workshop

Penggunaan anggaran harus disusun secara rasional dan proporsional, dan berorientasi pada pencapaian luaran yang berkualitas.

### 3.4. Mekanisme Pendanaan

Pencairan dana dilakukan secara bertahap berbasis milestone (*milestone-based disbursement*), dengan tahapan sebagai berikut:

- Termin pertama (80%) pada awal kegiatan setelah penandatanganan kontrak
- Termin kedua (20%) setelah penyampaian draft policy brief dan laporan kemajuan

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana selaras dengan progres kegiatan serta kualitas luaran yang dihasilkan.



## 4. PERSYARATAN PENGUSUL

### 4.1. Prinsip Umum

Persyaratan pengusul dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang untuk menjangkau peneliti yang memiliki kapasitas akademik, pemahaman kebijakan, serta kemampuan dalam mentransformasikan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan yang implementatif.

Sejalan dengan Renstra FTUI 2025-2029 yang menekankan pentingnya riset berdampak (*impact-driven research*), pengusul diharapkan mampu mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan perspektif kebijakan dan kebutuhan stakeholder.

### 4.2. Ketua Peneliti

Ketua peneliti harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Dosen atau peneliti aktif di lingkungan Universitas Indonesia
- Memiliki pengalaman penelitian yang relevan dengan isu kebijakan
- Memiliki kemampuan analisis kebijakan berbasis data
- Memiliki komitmen untuk menghasilkan policy brief yang implementatif

Ketua peneliti diharapkan mampu memimpin tim dalam menghasilkan analisis kebijakan yang komprehensif dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan.

### 4.3. Tim Peneliti

Tim peneliti disarankan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bersifat multidisiplin/interdisiplin sesuai dengan kompleksitas isu kebijakan
- Memiliki kompetensi dalam analisis data, kebijakan, dan komunikasi
- Salah satu peneliti anggota harus memiliki kompetensi di bidang kebijakan publik berasal dari kalangan akademis, praktisi, atau stakeholder kebijakan.

Pendekatan multidisiplin/interdisiplin penting untuk memastikan bahwa policy brief yang dihasilkan memiliki perspektif yang komprehensif dan relevan.

#### 4.4. Keterlibatan Stakeholder

Sebagai program yang berorientasi pada kebijakan, keterlibatan stakeholder menjadi elemen penting dalam penyusunan policy brief. Pengusul didorong untuk melibatkan:

- Instansi pemerintah
- Industri atau sektor swasta
- Organisasi masyarakat sipil

Keterlibatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan:

- Relevan dengan kebutuhan nyata
- Dapat diimplementasikan
- Memiliki peluang adopsi yang tinggi

#### 4.5. Ketentuan Tambahan

- Setiap peneliti hanya dapat mengajukan satu proposal sebagai ketua
- Proposal tidak sedang didanai oleh sumber lain dengan topik yang sama
- Peneliti wajib mengikuti seluruh mekanisme monitoring dan evaluasi
- Peneliti wajib menghasilkan policy brief sesuai standar program

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas program serta memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

## 5. JADWAL PELAKSANAAN

### 5.1. Prinsip Perencanaan Waktu

Jadwal pelaksanaan Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 disusun berdasarkan pendekatan milestone-based timeline yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian luaran kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, mulai dari analisis hingga diseminasi policy brief, dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan target dampak kebijakan.

Perencanaan waktu juga mempertimbangkan dinamika proses kebijakan, termasuk kebutuhan konsultasi dengan pemangku kepentingan, validasi rekomendasi, serta kesiapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, jadwal program dirancang tidak hanya untuk menghasilkan dokumen, tetapi juga untuk memastikan relevansi dan utilisasi policy brief dalam proses pengambilan keputusan.

### 5.2. Tahapan Pelaksanaan

Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- **Pengumuman dan Sosialisasi Program.** Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon pengusul mengenai tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme program. (30 April 2026)
- **Pengajuan Proposal.** Pengusul menyampaikan proposal policy brief yang memuat analisis masalah dan rekomendasi kebijakan. (30 April - 31 Mei 2026)
- **Evaluasi dan Seleksi.** Proposal akan melalui proses seleksi administrative dan substansi secara berjenjang. (1-9 Juni 2026)
- **Penetapan Penerima Hibah.** Penetapan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan keputusan pimpinan fakultas. (Pertengahan Juni 2026)
- **Pelaksanaan Kegiatan.** Kegiatan meliputi analisis kebijakan, konsultasi stakeholder, serta penyusunan policy brief. (Juli - Oktober 2026)
- **Monitoring dan Evaluasi.** Dilakukan untuk memastikan kualitas dan relevansi policy brief yang dihasilkan. (September 2026)

- **Diseminasi dan Pelaporan.** Policy brief disampaikan kepada stakeholder serta dilaporkan sebagai luaran program. (November 2026)

### 5.3. Periode Pelaksanaan

Periode pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu tahun, yaitu dari Mei 2026 hingga Mei 2027. Rentang waktu ini dirancang untuk memungkinkan peneliti menyelesaikan seluruh tahapan penelitian secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan eksperimen, analisis data, hingga penyusunan manuskrip untuk publikasi.

Peneliti diharapkan dapat mengelola waktu secara efektif dengan menetapkan target capaian pada setiap fase penelitian, sehingga proses menuju publikasi Q1 dapat berjalan secara terstruktur dan tepat waktu

### 5.4. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian integral dari sistem monitoring dan evaluasi program yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas serta ketercapaian target luaran. Setiap penerima hibah diwajibkan untuk:

- Menyampaikan laporan kemajuan (*progress report*)
- Menyampaikan policy brief draft
- Menyampaikan laporan akhir yang mencakup hasil dan rekomendasi kebijakan

Pelaporan dilakukan melalui sistem yang ditetapkan oleh FTUI dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja serta pencairan dana tahap berikutnya.

## 6. MEKANISME PENGAJUAN

### 6.1. Prinsip Umum Pengajuan

Mekanisme pengajuan proposal dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang berdasarkan prinsip *competitive selection*, *quality assurance*, dan *policy relevance*. Proses ini bertujuan untuk menjaring proposal terbaik yang memiliki kualitas analisis tinggi serta relevansi langsung terhadap kebutuhan kebijakan publik.

Pengajuan proposal tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan proses strategis dalam merancang intervensi kebijakan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan aspek implementabilitas dan dampak kebijakan.

### 6.2. Sistematika Proposal

Proposal harus disusun secara sistematis dengan struktur sebagai berikut:

1. Judul policy brief
2. Abstrak
3. Latar belakang kebijakan
4. Rumusan masalah
5. Analisis berbasis evidence
6. Tinjauan kebijakan eksisting
7. Rekomendasi kebijakan
8. Strategi implementasi
9. Rencana stakeholder engagement
10. Jadwal pelaksanaan
11. Rencana biaya anggaran

Dokumen harus menunjukkan keterkaitan yang jelas antara analisis ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penekanan utama diberikan pada kualitas analisis dan implementabilitas rekomendasi kebijakan.

### 6.3. Pengiriman Proposal

Proposal diajukan secara daring melalui sistem resmi FTUI [https://bit.ly/Hibah\\_PolicyBrief2026](https://bit.ly/Hibah_PolicyBrief2026) dalam periode yang telah ditetapkan. Pengusul bertanggung jawab untuk memastikan:

- Kelengkapan dokumen
- Kesesuaian format
- Ketetapan waktu pengajuan

Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif atau melewati batas waktu tidak akan diproses lebih lanjut. Setelah pengajuan, proposal akan melalui tahap verifikasi administratif sebelum dilanjutkan ke evaluasi substansi oleh reviewer. Dengan mekanisme ini, diharapkan proses seleksi dapat berjalan secara objektif, transparan, dan menghasilkan proposal policy brief dengan kualitas terbaik.

# 7. EVALUASI DAN SELEKSI

## 7.1. Prinsip Evaluasi

Proses evaluasi dan seleksi dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang untuk menjangkau proposal yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi kebijakan yang tinggi dan potensi implementasi yang kuat. Pendekatan evaluasi mengadopsi prinsip *merit-based selection*, *policy relevance*, dan *impact orientation*.

Sejalan dengan arah strategis Universitas Indonesia yang menekankan kontribusi riset terhadap kebijakan publik dan pembangunan nasional, evaluasi proposal difokuskan pada kemampuan pengusul dalam mentransformasikan hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional dan aplikatif.

Pendekatan ini juga mengacu pada praktik terbaik internasional dalam evaluasi kebijakan, seperti yang diterapkan oleh World Bank dan OECD, di mana kualitas analisis, relevansi kebijakan, serta implementabilitas menjadi faktor utama dalam penilaian.

## 7.2. Tahapan Seleksi

Proses seleksi proposal dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Seleksi Administratif:** Verifikasi kelengkapan dokumen serta kesesuaian proposal dengan persyaratan program.
2. **Evaluasi Substansi:** Penilaian mendalam terhadap kualitas analisis kebijakan, relevansi isu, serta kejelasan rekomendasi kebijakan.
3. **Penilaian Komprehensif dan Ranking.** Penggabungan hasil evaluasi untuk menghasilkan skor akhir dan peringkat proposal secara objektif.
4. **Penetapan Penerima Hibah:** Penetapan dilakukan berdasarkan peringkat dan keputusan pimpinan fakultas.

Tahapan ini dirancang untuk memastikan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berbasis kualitas.

## 7.2. Kriteria Penilaian

Penilaian proposal dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. **Relevansi Kebijakan (30%)** Menilai kesesuaian isu yang diangkat dengan kebutuhan kebijakan nasional maupun global.
2. **Kualitas Analisis (30%)** Menilai kekuatan evidence, metodologi analisis, serta kedalaman kajian.
3. **Implementabilitas Rekomendasi (20%)** Menilai sejauh mana rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara nyata.
4. **Stakeholder Engagement (20%)** Menilai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan policy brief.

Pendekatan ini memastikan bahwa proposal yang didanai memiliki keseimbangan antara kualitas ilmiah dan dampak kebijakan.



## 8. MONITORING DAN EVALUASI

### 8.1. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang sebagai sistem pengendalian kinerja berbasis dampak (*impact-based monitoring and evaluation*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan tidak hanya menghasilkan output berupa dokumen, tetapi juga berkontribusi terhadap proses pengambilan kebijakan.

Sejalan dengan Roadmap Riset UI yang menekankan kontribusi riset terhadap solusi kebijakan, monitoring dan evaluasi difokuskan pada kualitas policy brief serta potensi dampaknya terhadap stakeholder.

### 8.2. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala sepanjang periode pelaksanaan untuk memastikan kualitas dan progres kegiatan. Setiap penerima hibah diwajibkan untuk menyampaikan:

- Laporan kemajuan (*progress report*)
- Draft policy brief
- Hasil konsultasi dengan stakeholder

Selain itu, FTUI akan menyelenggarakan:

- Forum diskusi kebijakan
- Review diskusi kebijakan
- Sesi validasi dengan stakeholder

Monitoring juga dikaitkan dengan mekanisme pencairan dana berbasis kinerja.

### 8.3. Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan kualitas dan dampak policy brief yang dihasilkan. Aspek evaluasi meliputi:

- Kualitas policy brief (struktur, analisis, dan rekomendasi)
- Relevansi terhadap isu kebijakan strategis
- Tingkat implementabilitas

- Tingkat keterlibatan stakeholder

Evaluasi ini juga mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola.

#### 8.4. KPI dan Dampak Kebijakan

Program Hibah Policy Brief berkontribusi terhadap indicator kinerja utama FTUI dan UI, antara lain:

- Adopsi policy brief oleh instansi pemerintah
- Pengaruh terhadap formulasi kebijakan
- Tingkat engagement stakeholder
- Dampak terhadap penyelesaian isu strategis

Dengan pendekatan ini, program tidak hanya menghasilkan output berupa dokumen, tetapi juga *outcome* dan *impact* dalam bentuk perubahan kebijakan yang nyata.

## 9. MEKANISME PEMBAYARAN

### 9.1. Prinsip Umum Pembayaran

Mekanisme pembayaran dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang untuk memastikan pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja. Pendekatan yang digunakan mengadopsi prinsip *performance-based disbursement*, di mana pencairan dana dikaitkan secara langsung dengan progres kegiatan serta kualitas luaran policy brief yang dihasilkan.

Pendanaan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kualitas dan dampak kebijakan. Dengan demikian, setiap tahapan pencairan dana mencerminkan kesiapan kegiatan dalam menghasilkan policy brief yang relevan dan implementatif.

Sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam Renstra Universitas Indonesia, seluruh proses pembayaran dilaksanakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 9.2. Tahapan Pencairan Dana

Pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap berbasis milestone pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

#### 1. Termin Pertama (Initial Disbursement)

Termin pertama sebesar 80% dari total dana hibah diberikan setelah:

- Penetapan penerima hibah
- Penandatanganan kontrak
- Pemenuhan persyaratan administratif

Dana ini digunakan untuk mendukung tahap awal penelitian, termasuk analisis kebijakan awal, pengumpulan data, dan inisiasi konsultasi stakeholder.

#### 2. Termin Kedua (Progress-Based Disbursement)

Termin kedua sebesar 20% diberikan setelah peneliti:

- Menyampaikan laporan kemajuan
- Menyampaikan draft policy brief
- Menunjukkan bukti keterlibatan stakeholder

Pencairan dana tahap ini dilakukan setelah hasil evaluasi terhadap progres kegiatan dinyatakan memadai.

Dalam kondisi tertentu, FTUI dapat melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pencairan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

### 9.3. Akuntabilitas Penggunaan Dana

Setiap penggunaan dana harus sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui dan didukung oleh bukti administratif yang sah. Peneliti bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana serta wajib memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran berkontribusi langsung terhadap pencapaian luaran dan dampak kebijakan.

Pendekatan ini sejalan dengan *framework* RAISE yang menekankan hubungan antara *resource*, *activities*, dan *impact* dalam pelaksanaan program.

# 10. SANKSI

## 10.1. Prinsip Penerapan Sanksi

Dalam rangka menjaga integritas, akuntabilitas, dan efektivitas Program Hibah Policy Brief FTUI 2026, diterapkan mekanisme sanksi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal (*internal control system*). Penerapan sanksi dilakukan berdasarkan prinsip *fairness*, *proportionality*, dan *accountability*.

Sanksi diberikan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran serta dampaknya terhadap kualitas dan implementabilitas policy brief yang dihasilkan.

## 10.2. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan meliputi:

### 1. Ketidaktercapaian Luaran Wajib

Apabila peneliti tidak berhasil menghasilkan policy brief yang memenuhi standar kualitas dan implementabilitas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dikenakan sanksi:

- Pengembalian sebagian atau seluruh dana hibah
- Pembatasan keikutsertaan dalam program hibah berikutnya

### 2. Keterlambatan Pelaksanaan dan Pelaporan

Keterlambatan tanpa justifikasi yang jelas dapat dikenakan sanksi administratif:

- Penundaan pencairan dana
- Teguran tertulis

### 3. Penyimpangan Penggunaan Dana

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi:

- Kewajiban pengembalian dana
- Tindakan administratif sesuai atauran universitas

### 4. Pelanggaran Integritas Akademik

Pelanggaran seperti plagiarisme, manipulasi data, atau pelanggaran etika penelitian dikenakan sanksi tegas:

- Pembatalan hibah
- Pengembalian dana

- Sanksi disiplin sesuai kebijakan universitas

#### 5. **Ketidakterlibatan Stakeholder**

Apabila peneliti tidak melibatkan stakeholder sebagaimana direncanakan sehingga mengurangi relevansi kebijakan, maka dapat dikenakan sanksi:

- Penurunan penilaian kinerja
- Evaluasi ulang kelayakan program

### 10.3. **Ketentuan Khusus**

Dalam kondisi tertentu, seperti force majeure atau perubahan kebijakan nasional, FTUI dapat mempertimbangkan penyesuaian terhadap penerapan sanksi.

Seluruh keputusan terkait sanksi ditetapkan melalui mekanisme evaluasi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penerapan mekanisme sanksi yang jelas dan tegas, program ini diharapkan dapat membangun budaya riset kebijakan yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.

# 11. LUARAN DAN KPI

## 11.1. Prinsip Penetapan Luaran

Luaran dan indikator kinerja (Key Performance Indicators/KPI) dalam Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 dirancang sebagai instrumen utama untuk mengukur keberhasilan program secara objektif, terukur, dan berbasis dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip impact-driven research yang menekankan hubungan antara hasil penelitian, rekomendasi kebijakan, serta kontribusi terhadap pembangunan nasional dan global.

Sejalan dengan Roadmap Riset Universitas Indonesia 2025-2029, luaran penelitian tidak hanya diukur dari publikasi ilmiah, tetapi juga dari kontribusinya terhadap solusi kebijakan yang nyata.

## 11.2. Luaran Wajib

Luaran utama program ini adalah:

- Satu (1) dokumen policy brief yang:
  - Berbasis evidence dan analisis ilmiah
  - Memiliki rekomendasi kebijakan yang jelas dan implementatif
  - Relevan dengan isu strategis nasional atau global
  - Policy brief harus disusun sesuai standar kualitas internasional dan
  - Dokumen disampaikan kepada pemangku kebijakan untuk dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan.

## 11.3. Luaran Tambahan

Selain luaran wajib, program ini mendorong pencapaian luaran tambahan yang dapat memperkuat dampak kebijakan, antara lain:

- Diseminasi policy brief kepada instansi pemerintah atau stakeholder
- Penyelenggaraan forum diskusi kebijakan atau workshop
- Publikasi ilmiah pendukung
- Kolaborasi dengan lembaga nasional atau internasional

## 11.4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam program ini mencakup:

- **Policy Adoption:** tingkat adopsi policy brief oleh instansi pemerintah
- **Policy Influence:** kontribusi terhadap perumusan kebijakan
- **Stakeholder Engagement:** tingkat keterlibatan pemangku kepentingan
- **Societal Impact:** dampak terhadap penyelesaian isu strategis

Indikator ini dirancang untuk mengukur tidak hanya output, tetapi juga *outcome* dan *impact* dari program.

## 11.5. Keterkaitan dengan KPI Global

Program Hibah Policy Brief berkontribusi terhadap indikator kinerja global Universitas Indonesia, antara lain:

- Dampak penelitian terhadap masyarakat
- Kolaborasi dengan stakeholder dan institusi eksternal
- Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Pendekatan ini sejalan dengan indikator pemeringkatan global seperti QS dan Times Higher Education yang menekankan dampak riset terhadap masyarakat.



## 12. PENUTUP

Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran Fakultas Teknik Universitas Indonesia sebagai institusi yang tidak hanya unggul dalam penelitian, tetapi juga berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti dan berdampak nyata.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, transformasi riset menjadi kebijakan menjadi salah satu kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Oleh karena itu, program ini dirancang tidak hanya sebagai skema pendanaan, tetapi sebagai platform strategis untuk mendorong integrasi antara riset, inovasi, dan kebijakan publik.

Sejalan dengan visi FTUI dalam Renstra 2025-2029 untuk menjadi institusi keteknikan berdaya saing global dan berdampak luas, program ini diharapkan dapat memperkuat posisi FTUI dalam ekosistem kebijakan nasional dan internasional.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan profesionalisme seluruh sivitas akademika serta dukungan stakeholder eksternal. Sinergi antara akademisi, pemerintah, dan industri menjadi kunci dalam memastikan bahwa policy brief yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sebagai penutup, Program Hibah Policy Brief FTUI 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen kebijakan, tetapi juga menciptakan dampak nyata dalam bentuk perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan semangat inovasi dan orientasi global, FTUI diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan penguatan posisi Indonesia di tingkat global.

**PROPOSAL**  
**PROGRAM HIBAH POLICY BRIEF 2026**  
(Times New Roman size 12pt, all caps, bold, centered)



**Judul Proposal**  
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)

**Nama Periset Utama**  
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)  
**NIP/NUP**  
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)

**Pusat Riset**  
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)  
**Fakultas Teknik**  
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)  
**Universitas Indonesia**  
(Times New Roman size 12 pt, bold, centered)  
**Tahun 2026**

**Lampiran 2: Lembar Pengesahan**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Proposal : \_\_\_\_\_  
Topik Prioritas : \_\_\_\_\_  
SDGs Terkait : \_\_\_\_\_  
Periset Utama  
a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
b. NIP/NUP : \_\_\_\_\_  
c. Jabatan Fungsional : \_\_\_\_\_  
d. Pusat Riset : \_\_\_\_\_  
e. Nomor HP : \_\_\_\_\_  
f. Alamat surel (e-mail) : \_\_\_\_\_  
Periset Anggota  
a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
b. NIP/NPM : \_\_\_\_\_  
c. Alamat surel (e-mail) : \_\_\_\_\_  
Periset Anggota  
a. Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
b. NIP/NPM : \_\_\_\_\_  
c. Alamat surel (e-mail) : \_\_\_\_\_  
Durasi Pelaksanaan : \_\_\_\_\_  
Total Dana Usulan : \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
**Ketua Departemen**

Depok, 2026  
**Periset Utama**

Tanda tangan dan Cap

(Nama lengkap & gelar)  
NIP/NUP

(Nama lengkap & gelar)  
NIP/NUP

### Lampiran 3: Substansi Usulan

<p><b>Topik Prioritas (pilih salah satu)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Transformasi Digital dan Artificial Intelligence;</li><li>(2) Transisi Energi dan Keberlanjutan;</li><li>(3) Infrastruktur dan Kota Berkelanjutan;</li><li>(4) Teknologi Kesehatan dan Sistem Biosains;</li><li>(5) Perubahan Iklim dan Lingkungan; dan</li><li>(6) Sistem Keamanan Siber dan Teknologi Terpercaya</li></ol>
<p><b>Judul (Title)</b></p> <p>Memuat judul singkat, spesifik, dan mencerminkan isu kebijakan strategis yang menjadi fokus policy brief.</p>
<p><b>Abstrak (100—250 kata)</b></p> <p>Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan, metode analisis, temuan utama, dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan.</p>
<p><b>Latar Belakang Kebijakan</b></p> <p>Menguraikan konteks, urgensi, dan pentingnya isu kebijakan berdasarkan kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi.</p>
<p><b>Rumusan Masalah</b></p> <p>Menjelaskan permasalahan utama yang ingin diselesaikan melalui rekomendasi kebijakan berbasis evidence.</p>
<p><b>Analisis Berbasis Evidence</b></p> <p>Menyajikan analisis data, hasil riset, atau bukti empiris yang mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan.</p>
<p><b>Tinjauan Kebijakan Eksisting</b></p> <p>Mengulas regulasi, program, atau kebijakan yang telah ada beserta kelebihan, kelemahan, dan gap implementasinya.</p>
<p><b>Rekomendasi Kebijakan</b></p> <p>Menyampaikan usulan kebijakan yang aplikatif, strategis, dan relevan untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi.</p>
<p><b>Strategi Implementasi</b></p> <p>Menjelaskan tahapan, mekanisme, aktor pelaksana, dan pendekatan implementasi agar rekomendasi dapat dijalankan secara efektif.</p>
<p><b>Rencana Stakeholder Engagement</b></p> <p>Menguraikan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, validasi, dan diseminasi policy brief.</p>



## Lampiran 5: Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rinciannya

Judul Riset : \_\_\_\_\_

Periset Utama : \_\_\_\_\_

Skema Riset : \_\_\_\_\_

Deskripsi	Biaya (Rp.)
Biaya bahan habis pakai	
Biaya perjalanan penelitian	
Biaya operasional lainnya	
<b>Total</b>	

### Rincian RAB

Deskripsi	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
<b>Biaya Bahan Habis Pakai</b>				
Bahan Laboratorium				
Biaya proofreading				
Biaya Publikasi				
SUBTOTAL (Rp)				
<b>Biaya Perjalanan</b>				
Biaya tiket				
Biaya akomodasi				
Tansport lokal				
SUBTOTAL (Rp)				
<b>Biaya Operasional Lainnya</b>				
ATK				
Fotokopi				
SUBTOTAL (Rp)				
<b>Total Anggaran (Rp)</b>				

Menyetujui,  
**Ketua Departemen**

Tanda tangan dan Cap

(Nama lengkap & gelar)  
NIP/NUP

Depok, 2026  
**Periset Utama**

(Nama lengkap & gelar)  
NIP/NUP

## Lampiran 6: CV Periset Utama dan Anggota

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki/ Perempuan
3	Fakultas/ Sekolah dan Prodi	
4	NIP/NUP	
5	E-mail	
6	Nomor Telepon/HP	

### B. Identitas sebagai penulis

1	Nama yang digunakan dalam publikasi	
	a. <i>Last name</i>	
	b. <i>First name/ abbreviation</i>	
2.	<i>Scopus Author / Web of Science ID</i>	
	Info Scopus/ <i>Web of Science</i>	<i>h-index</i> : , jumlah dokumen: total citasi: ..... oleh ..... dokumen
3.	ID Orcid (jika ada)	
4.	ID Google Scholar	<i>h-index</i> : , jumlah dokumen Total citasi: ..... oleh ..... dokumen

### C. Publikasi Ilmiah Terkait Topik Kebijakan (5 Tahun Terakhir)

No.	Judul	Bentuk (Policy Brief, White Paper, Policy Paper, dll)	Volume/ Nomor/Tahun	Posisi ( <i>First /Co- /Corresponding Author</i> )
1				
2				
3				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan proposal Hibah Policy Brief 2026.

Depok, .....2026  
Pengusul,

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 7: Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pendanaan Lain

**SURAT PERNYATAAN PERISET UTAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
NIP/NUP : .....  
Pusat Riset/Fakultas : .....  
Alamat : .....

dengan ini menyatakan sejujurnya bahwa usulan riset saya dengan judul:

.....  
.....

yang diajukan dalam Skema Hibah Policy Brief 2026 **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/instansi lain**. Saya bersama tim periset bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil penelitian sesuai target luaran wajib skema hibah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya riset yang sudah diterima ke kas Universitas Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di:.....  
Pada Tanggal ..... 2026

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan

**(METERAI Rp 10.000)**

Ketua Departemen  
NIP.....

Nama Periset Utama  
NIP.....



